



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

RAPAT KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : 5
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan : 1. Kepala P2JK Kemenkes RI;
2. Kemenkeu (Ditjen Anggaran);
3. DJSN.
4. BPJS Kesehatan (Direksi dan Dewas);
5. Cheps-UI
6. IDI;
7. PERSI;
8. ARSSI;
9. ARSADA;
10. IPMG;
11. GP FARMASI;

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 13 Maret 2018
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Acara : Penyusunan Jadwal dan Agenda Rapat
Ketua Rapat : Dra. Hj. Ermalena, MHS/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Minarni, SH/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I
Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. 16 orang dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI; 4 orang Izin.

B. Pemerintah/Lembaga:

1. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kemenkes RI, dr. Kalsum Komaryani, MPPM;
2. Ditjen Anggaran Kemenkeu RI, Jani Aryanto
3. Dewas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution
4. Cheps-UI, Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, Ph.D.;
5. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ahmad Ansyori;
6. Direksi BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, Mundiharno;
7. Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Noor Arida Sofiana, MBA;
8. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), dr. Tonang Dwi Ardyanto, Sp.PK, Ph.D;
9. Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (ARSSI) Dr. Irwan Heriyanto, MARS;

I. PENDAHULUAN

Audiensi Komisi IX DPR RI dengan Pimpinan KSPI, Pimpinan SP Asia Pasific (ITUC AP), Pimpinan ACTU Australia, Pimpinan SP Luar Negeri (Union Aid Abroad-APHEDA) dan Senior Specialis ILO dibuka pukul 11.00 WIB dan rapat terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

- A. Hal-hal yang disampaikan oleh KSPI, ITUC-AP, ACTU Australia, UNION AID ABROAD – APHEDA, serta Senior Specialist dari ILO, yaitu:
1. Asbes sangat berbahaya terhadap kesehatan, baik bagi pekerja (produsen asbes), maupun masyarakat umum (konsumen yang menggunakan produk asbes) karena asbes ini mempunyai cakupan pemaparan yang sangat luas karena hanya berbentuk serat (*fiber*) dan tidak terlihat oleh mata dan yang lebih membahayakan lagi adalah deteksi dari yang terkena dampak asbes ini adalah 20 tahun kemudian. Jadi asbestos ini disebut juga dengan "*silent killer*".
 2. Hal lain yang dikhawatirkan adalah, pihak yang terpapar dari asbes ini tidak saja pekerja, tapi para keluarga, karena sangat tidak mungkin pekerja dilindungi hanya dengan masker karena serat asbes berupa partikel yang bebas di udara.
 3. Adapun produk-produk yang menggunakan asbestos (asbes) ini antara lain, atap rumah, plafond, kabel untuk listrik, pipa isolasi untuk air, kampas rem, dan juga banyak digunakan pada industri perkapalan.
 4. Pada saat ini ada lebih dari 60 negara sudah melarang penggunaan asbes untuk pemakaian dalam negeri mereka, namun atas dasar pelarangan tersebut akhirnya mereka mengekspor asbestos ke negara-negara yang belum ada larangan sama sekali, antara lain Indonesia, India, Cina, Vietnam, dan lain-lain.
 5. Indonesia sudah mengkonsumsi lebih dari 120 ribu ton asbes untuk industri dan telah mengimpor lebih kurang 120an ribu ton pertahun tersebut.
 6. Asbes sebaiknya diperlakukan sama halnya dengan narkotika serta senjata, karena mempunyai efek yang mematikan, sehingga satu-satunya jalan terhadap penggunaan asbestos ini adalah pelarangan.
 7. Dari faktor perlindungan pekerja, ada yang belum terdiagnosa dan ada yang tidak dilaporkan.
 8. Indonesia dapat mencontoh Australia dalam hal upaya pelarangan bahan asbes ini, karena disana ada badan khusus yang menangani masalah tersebut.
 9. Sebenarnya payung hukum terhadap perlindungan pekerja yang menggunakan bahan dasar asbes ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per.03/MEN/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes, namun KSPI menganggap pelaksanaan di lapangan belum maksimal.

10. Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), Dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM, Dr. Jenny Lesmana, DR. Dr. Titi Masrifahati, M.Kes.;
11. Gabungan Perusahaan FARMASI (GP FARMASI), Darodjatun Sanusi;
12. *International Pharmaceutical Manufactures Group (IPMG)*, Parulian Simanjuntak; beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Intern Tim Kecil (Tindak Lanjut Seminar JKN) Komisi IX DPR RI dengan Kepala P2JK Kemenkes RI, Ditjen Anggaran Kemenkeu RI, DJSN, Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan, Cheps-UI, IDI, PERSI, ARSSI, ARSADA, GP FARMASI dan IPMG, dibuka pukul 14.32 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

Rapat memutuskan Jadwal dan Agenda Rapat Tim Kecil sebagai berikut:

NO	AREA	TANGGAL	TEMATIK	STAKEHOLDER
1.	Pendanaan	Rabu, 14 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai & Sumber • Politik Anggaran • Defisit (<i>mismatch</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandatory : Kemkeu (Dirjen Anggaran), Kemkes (P2JK), DJSN, BPJS (Dewas&Direksi), IDI, PDGI, IAI, PERSI, ARSSI, ARSADA, ADINKES, PKFI, ASKLIN • Optional : stakeholder lain • Isu Regulasi
2.	Pembayaran Faskes	Kamis, 15 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Tarif YanKes • Sistem, Mekanisme & Inovasi • Penerapan Pembayaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandatory: PERSI, ARSSI, ARSADA, ADINKES, PKFI, ASKLIN, Kemkes (P2JK), Kemkeu (Dirjen Anggaran), DJSN, BPJS (Dewas&Direksi), IDI, PDGI, IAI, IPMG, GP Farmasi, PAMJAKI • Optional : stakeholder lain (<i>Gapopin, patient group</i>) • Isu Regulasi
3.	Pemanfaatan & Kualitas Layanan	Senin, 19 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan FKTP & FKRTL • Layanan Obat • Audits Medis 	<ul style="list-style-type: none"> • Mandatory : Kemkes (P2JK), IDI, PDGI, IAI, IAKMI, PERSAKMI, PERSI, ARSSI, ARSADA, PKFI, ADINKES, ASKLIN, GP Farmasi, IPMG, BPRS, DJSN, YLKI, BPJS Kes

NO	AREA	TANGGAL	TEMATIK	STAKEHOLDER
				(Dewas&Direksi) <ul style="list-style-type: none"> Optional : stakeholder lain Isu Regulasi
4.	Outputs	Senin, 9 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> Unintended impacts Kepuasan Stakeholders 	<ul style="list-style-type: none"> Mandatory: IDI, PDGI, IAI, KPK, PERSI, ARSSI, ARSADA, PKFI, ADINKES, ASKLIN, PKFI, YLKI Optional : stakeholder lain, <i>patient group</i>
5.	Kepesertaan	Selasa, 10 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> Targeting PBI Mandatory & compliance 	<ul style="list-style-type: none"> Mandatory: DJSN, Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, BPS, BKKBN, TNP2K, ASKLIN, PKFI, IDI, PDGI Optional : stakeholder lain, KSP Isu Regulasi :
6.	<i>Cross cutting issues</i>	Rabu 11 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik Alamiah Kesehatan Faskes & Pasar YanKes Bisnis Proses JKN Passive Purchaser 	<ul style="list-style-type: none"> Mandatory : Kemkeu (Dirjen Anggaran), Kemkes (P2JK), DJSN, BPJS (Dewas&Direksi), IDI, PDGI, PERSI, ARSSI, ARSADA, PKFI, ADINKES, ASKLIN Optional : stakeholder lain, KSP Isu Regulasi
7.	Rapat Pleno	Kamis 12 April 2018	membahas hasil dari masing-masing tim kecil	

Rapat diakhiri pukul 16.00 WIB.

Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,

DRA. HJ. ERMALENA, MHS
A-536